

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi mengakibatkan terjadinya pertemuan antar berbagai peradaban dan budaya. Pertemuan seperti itu seringkali menghasilkan suasana yang mendukung pengembangan intelektual, teknologi dan juga kreativitas seni. Ini terjadi karena globalisasi memaksa berbagai bangsa, masyarakat dan juga setiap individu untuk melakukan introspeksi diri, meredefinisi dan membangun kembali identitasnya. Tujuannya jelas, yaitu agar dapat beradaptasi dengan perkembangan dan semangat zaman. Salah satu organisasi tertua dan terbesar di Indonesia, Muhammadiyah, pun tak bisa mengelak dari tuntutan perubahan akibat globalisasi.¹

Respons terhadap globalisasi ini ditampilkan oleh Muhammadiyah dengan slogan “Islam Berkemajuan”. Sebelum 2009, slogan ini jarang terdengar, bahkan di kalangan Muhammadiyah sendiri. Ia baru diperkenalkan kembali, setelah cukup lama terpendam, dengan terbitnya buku berjudul *Islam Berkemajuan: Kiai Ahmad Dahlan dalam Catatan Pribadi Kiai Syuja* (2009). Buku yang ditulis oleh murid langsung Kiai Dahlan ini di antaranya menjelaskan seperti apa karakter Islam yang dibawa oleh Muhammadiyah.²

Istilah yang dipakai Muhammadiyah awal untuk menyebut dirinya adalah “Islam Berkemajuan”. Pada Muktamar di Yogyakarta 2010, istilah ini lantas

¹ Mitsuo Nakamura dalam Ahmad Najib Burhani, *Muhammadiyah Berkemajuan*, Bandung: Mizan, 2016, hal. 25

²*Ibid.*, hal. 60

dipakai dan dipopulerkan untuk mengidentifikasi karakter keislaman Muhammadiyah. Dalam kaitannya dengan globalisasi, Islam Berkemajuan itu sering dimaknai dengan “Islam Kosmopolitan”, yakni kesadaran bahwa masyarakat Muhammadiyah adalah bagian dari warga dunia yang memiliki “rasa solidaritas kemanusiaan universal dan rasa tanggungjawab universal kepada sesama manusia tanpa memandang perbedaan dan pemisahan jarak yang bersifat primordial dan konvensional.”³

Muhammadiyah sekarang mencoba menjadi gerakan pencerahan dengan membawa spirit Islam yang berkemajuan. Sebenarnya makna berkemajuan itu artinya adalah kosmopolitan.⁴ Kosmopolitan sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti *citizen of the world*, bahwa kita ini adalah warga dunia. Warga Muhammadiyah memang hidup dan berkembang di Indonesia, akan tetapi secara peradaban, Muhammadiyah tidak lepas dari pengaruh peradaban dunia. Muhammadiyah memilih berdialog, berpikir keluar dari lingkup Indonesia untuk mempromosikan Islam Indonesia itu ke dunia luar. Ini adalah salah satu pencapaian yang sangat baik dari Muhammadiyah hampir selama satu abad ini. Muhammadiyah memilih membuka diri dan berani berhadapan dengan dunia luar. Tidak hanya itu, Muhammadiyah juga melakukan dialog dan *sharing* kepada dunia luar. Karena selama ini umat Islam di Indonesia mengalami – meminjam bahasa Najib Burhani- *Inferiority Complex*. Kita mengalami rasa minder ketika berhadapan dengan bangsa lain. Kita mengalami *majority with minority mentality*. Maksudnya yaitu kita mayoritas sebagai umat Islam, tetapi

³Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tanfidz Keputusan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah (Muktamar Muhammadiyah ke-46)*, Yogyakarta, 2010, hal. 18

⁴*Ibid.*, hal. vii

merasa minor karena kurangnya prestasi secara peradaban yang dicapai. Karena itulah masalah-masalah seperti tidak percaya diri dan sebagainya itu harus diatasi dengan semangat kosmopolitan. Dan Muhammadiyah telah berani memulainya. Meskipun terbelang terlambat.

Mengapa Islam Kosmopolitan menjadi pilihan Muhammadiyah? Muhammadiyah menyadari bahwa kelahirannya merupakan produk dari interaksi Timur Tengah dan Barat yang dikemas menjadi sesuatu yang autentik di Indonesia. Ia memadukan pemikiran Muhammad Abduh, sistem yang berkembang di Barat dan karakter ke-Islaman di Indonesia. Karena itu, karakter kosmopolitanisme yang dikembangkan Muhammadiyah diharapkan menjadi wahana untuk dialog antarperadaban.⁵

Sejalan dengan itu untuk mempertegas karakter dan visi kosmopolitanisme Islam Berkemajuan, ada baiknya mengutip istilah dari begawan Muhammadiyah, adalah Amin Abdullah yang menyatakan bahwa:

“Islam yang berkemajuan adalah Islam yang berada di tengah-tengah arus putaran globalisasi dalam praxis, globalisasi dan perubahan sosial dalam praktik hidup sehari-hari, dan bukannya globalisasi dalam teori. Yaitu dunia global seperti yang benar-benar di alami dan dirasakan sendiri oleh para pelakunya di lapangan, yang sehari-hari memang tinggal dan hidup di negara-negara sumber dari globalisasi itu sendiri, baik dari segi transportasi, komunikasi, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seterusnya.”

Alam pikiran Muhammadiyah harus selalu berorientasi pada nilai-nilai peradaban yang kosmopolitan, melintasi sekat-sekat kultural, dan memperjuangkan tegaknya keadaban publik.

Globalisasi telah mengubah banyak hal dalam tatanan dunia ini. Salah satu yang terpengaruh olehnya adalah identitas, baik identitas individu maupun

⁵ Ahmad Najib, Op.cit., hal. 60

kelompok. Pun juga dengan Muhammadiyah, sebagai organisasi, mau tidak mau harus menyesuaikan diri di tengah derasny arus globalisasi yang tercipta terutama karena revolusi teknologi komunikasi dan transportasi. Inilah diantaranya yang melatari lahirnya identitas baru yang sekarang di sematkan kepada Muhammadiyah, yakni Islam Berkemajuan. Namun sebelum membahas lebih jauh tentang Islam Berkemajuan, penulis ingin mengajak kita sama-sama melacak kembali identitas apa saja yang pernah di sematkan kepada Muhammadiyah sepanjang perjalanan narasi sejarahnya.

Dalam perjalanannya sejarahnya, ada beberapa sebutan atau identitas yang melekat pada organisasi yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada 1912 ini. Diantara identitas tersebut adalah Islam Modernis, Islam Puritan, Islam Reformis, Islam Moderat, Islam Progresif dan Islam Murni. Sebagian identitas itu adalah pemberian atau dilekatkan orang dari luar Muhammadiyah kepada organisasi ini setelah melakukan observasi, kebanyakan dari mereka adalah peneliti, dan sebagian lagi di berikan oleh orang yang tak sejalan dengan pemikiran Muhammadiyah. Ada pula Identitas yang di klaim oleh orang-orang Muhammadiyah sendiri untuk memberikan karakter kepada organisasi yang diikutinya tersebut.

Deliar Noer dalam buku yang berjudul *Gerakan Modern Islam di Indoensia, 1900-1942* (1972), misalnya, memasukkan Muhammadiyah sebagai bagian dari gerakan modernis Islam di Indonesia. Berbeda dari Noer, James L. Peacock dalam dua bukunya yang berjudul *Purifying the Faith: The Muhammadiyah Movement in Indonesian Islam* (1978) dan *Muslim Puritans:*

Reformist Psychology in Southeast Asian Islam (1978),⁶ menyebutkan bahwa Muhammadiyah sebagai representasi dari gerakan keagamaan yang puritan.

Sedangkan Muhammadiyah sebagai gerakan Reformis disebutkan oleh Ahmad Jainuri dalam bukunya *Ideologi Kaum Reformis: Melacak Pandangan Keagamaan Muhammadiyah Periode Awal* (2002). Tidak hanya Ahmad Jainuri, M. Amin Abdullah pun turut menyebut Muhammadiyah sebagai Islam Reformis dalam tulisannya yang berjudul *Paradigma Tauhid Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam Modernis-Reformis* (2011). Tetapi Abdul Munir Mulkan menggunakan istilah Islam Murni untuk mengidentifikasi salah satu karakter dari orang Muhammadiyah. Ini terlihat dalam bukunya yang berjudul *Islam Murni dalam Masyarakat Petani* (2009).⁷

Identitas Muhammadiyah sebagai organisasi “Islam Modernis” ini sering kali disandingkan atau di lawankan dengan “Islam Tradisionalis” dengan mengacu terutama kepada NU (Nahdlatul Ulama). Organisasi yang di kategorikan sebagai modernis sebetulnya bukan hanya Muhammadiyah, tetapi juga Persatuan Islam dan Sarekat Islam. Namun karena Muhammadiyah yang paling besar dan masih aktif hingga sekarang, maka istilah gerakan “Islam Modernis” lebih sering di asosiasikan kepada Muhammadiyah. Pun juga dengan istilah “Islam Tradisionalis” tidak hanya mengacu kepada NU saja, namun juga ada Nahdlatul Wathan dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) yang dimasukkan kedalam kategori “Islam Tradisionalis”. Namun sekali lagi karena NU lah yang terbesar, maka istilah tersebut lebih di lekatkan kepada NU.

⁶Haedar Nashir dkk, *Kosmopolitanisme Islam Berkemajuan: Catatan Kritis Mukhtamar Teladan Ke-47 Muhammadiyah di Makassar 2015*, Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2016

⁷Ibid., h. 32.

Namun demikian, dikotomi Muhammadiyah dan NU sebagai representasi gerakan Islam Modernis dan Islam Tradisionalis kini kian memudar. Ini dikarenakan NU sudah menggunakan sistem organisasi, pengobatan, dan bahkan NU telah merintis beberapa universitasnya.

Identitas Muhammadiyah sebagai gerakan reformis sering dikaitkan dengan sikap Muhammadiyah terhadap TBC (Takhayul, bid'ah dan Churafat), anti-mazhab fikih atau tidak bermazhab, dan anggapan terhadap Muhammadiyah sebagai gerakan yang anti-tasawuf. Sementara sebutan Islam Puritan sering dikaitkan dengan konsep *al-ruju' ila al-Qur'an wa al-Sunnah* (Kembali ke al-Qur'an dan Sunnah), yaitu menekankan pada dua sumber utama dari Islam itu dan kurang menaruh perhatian kepada kitab kuning atau khazanah klasik dari Islam. Makna ini lebih dekat dengan istilah konservatif. Makna lain dari puritan yang kadang dipahami adalah mengaitkan organisasi ini dengan gerakan Al-Muwahhidun atau Wahabi yang dipimpin oleh Muhammad bin Abdul Wahhab di Timur Tengah.

Sebetulnya, sebutan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam Puritan itu baru muncul pada awal tahun 1980-an ketika James Peacock menuliskan dua bukunya tersebut diatas, maka makna puritan itu justru positif, yaitu mengacu kepada kelompok puritan atau Calvinis di Eropa dan Amerika Serikat, terutama mengacu kepada *Protestant ethic* dan *The spirit of capitalism*. Mengikuti tesis dari Mark Weber, kapitalisme di Eropa dan Amerika adalah berangkat dari kelompok agama ini. Nah, Peacock, dan juga Clifford Geertz melihat bahwa Muhammadiyah adalah model dari Calvinisme di dunia Islam. Jadi, jika istilah

puritanisme dengan pemaknaan wahabi adalah negatif, maka makna Calvinisme ini memiliki konotasi positif.⁸

Sedangkan yang paling baru ini adalah terma Islam Berkemajuan yang di anggap sebagai identitas Muhammadiyah. Sebenarnya istilah Islam Berkemajuan ini baru saja muncul ketika ditemukannya catatan pribadi Kiai Syuja' (1882-1962) tentang gurunya yaitu Kiai Dahlan. Manuskrip asli tersebut awalnya berjudul *Muhammadiyah dan Pendirinya*, lalu kemudian diterbitkan menjadi buku dengan judul *Islam Berkemajuan: Kisah Perjuangan K.H. Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah Masa Awal* (2009).

Kelahiran dari slogan identitas “Islam Berkemajuan” memiliki kemiripan dengan apa yang terjadi ketika awal-awal kelahiran Muhammadiyah. Yaitu lahir sebagai reaksi terhadap penjajahan, misi kristen, pemikiran Muhammad Abduh dan budaya Jawa. Bisa dikatakan bahwa apa yang terjadi saat ini adalah semacam *déjà vu*.⁹

Meski istilah Islam Berkemajuan itu sudah dipakai ketika zaman awal berdirinya Muhammadiyah, namun sepertinya kata-kata tersebut tidak mengacu kepada identitas tertentu. Berkemajuan memang mengacu pada visi dan cara berfikir ke depan, namun tidak menjadi simbol, slogan atau jargon tertentu Muhammadiyah ketika itu.

Seperti yang dijelaskan oleh Din Syamsuddin, bahwa:

“Islam Berkemajuan memiliki visi yang melintasi dimensi ruang dan dimensi waktu. Visi ini tidak terikat sekat tempat tertentu, karena jika demikian Islam akan kehilangan watak universalnya. Visi Islam Berkemajuan juga tidak terikat sela masa terbatas, karena jika demikian Islam akan tergerus oleh sifat keabadiannya. Visi Islam Berkemajuan

⁸Ahmad Najib, *op.cit.*, h. 37

⁹*Ibid.* h. 61

melampaui wilayah dalam lintang bumi dan mendahului jelajah pada garis zaman. Visi Islam Berkemajuan bertumpu dan mengacu pada dimensi gerak, yakni proses dinamis dan sistematis dalam penciptaan karya-karya kebudayaan dalam alir dan arus kemajuan berkelanjutan (sustainable innovation).”¹⁰

Ahmad Najib Burhani, menyatakan bahwa sebetulnya inti dari Islam Berkemajuan itu tercermin dalam rekomendasi keputusan hasil Muktamar Muhammadiyah di Makassar. Di antaranya terwujud dalam keyakinan bahwa Indonesia atau negara Pancasila bagi umat Islam merupakan *dar al-‘ahd wa al-syahadah* (negara yang merupakan hasil konsensus dan tempat pembuktian untuk menjadi negeri yang aman dan damai), bahwa dakwah yang perlu dilakukan pada masa sekarang adalah model dakwah pencerahan berbasis komunitas, perlunya pelayanan terhadap kelompok difabel dan minoritas, peningkatan tradisi ilmiah, dan dialog Sunni-Syiah dalam mengatasi konflik di Indonesia.¹¹

Barangkali tidak terlalu mengada-ngada bahwa visi kosmopolitanisme Islam Berkemajuan tersebut selain melihat kondisi dunia secara universal, salah satunya berangkat dari dinamika kepemimpinan di Muhammadiyah, dalam kurun waktu 19 tahun reformasi mencerminkan kepemimpinan dari produk generasi yang kosmopolitan. Setelah reformasi, Din Syamsuddin merupakan satu-satunya ketua umum yang memimpin Muhammadiyah selama 10 tahun. Amien Rais terpilih pada 1995 di Muktamar Aceh tidak sempat menyelesaikan masa baktinya. Karena pilihan ijtihad politiknya yang mendirikan Partai Amanat Nasional pada 1998. Sahabat karibnya, Ahmad Syafi'i Maarif, melanjutkan periode yang tersisa hingga Muktamar Muhammadiyah tahun 2000

¹⁰ Haedar Nashir dkk, *op.cit.*, h. 11.

¹¹ Ahmad Najib, *Op.cit.*, hal. 44

di Jakarta. Syafi'i Maarif pun terpilih menjadi ketua umum ditengah transisi sosial-politik dan konflik kebangsaan yang sebenarnya sungguh dapat mengganggu netralitas Muhammadiyah.¹²

Profil dan keserjanaan Amien Rais, Syafi'i Maarif dan Din Syamsuddin merepresentasikan generasi Muhammadiyah yang kosmopolitan dimana pengetahuan "Timur" dan "Barat" bertemu, bahkan menjadi bagian tak terpisahkan dari biografi sosio-intelektualnya. Adanya perbedaan karakter dan langgam kepemimpinan ketiganya merupakan sisi lain dari ketidaktunggalan ekspresi kosmopolitanisme itu sendiri. Sejarawan UGM, Bambang Purwanto (2015), menyebut Muhammadiyah sebagai contoh produk persilangan budaya dalam keberagaman yang melibatkan Islam, Jawa, Minangkabau, dan modernitas Barat.¹³

Setidaknya ada beberapa alasan mengapa Muhammadiyah memilih isu Kosmopolitan ini. Kita dapat melihatnya dalam Tanfidz Keputusan Muktamar yang ke-47 Muhammadiyah, yaitu:¹⁴

1. Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Perubahan iklim sebagai dampak dari pemanasan global. Tingginya polusi, banyaknya rumah kaca dan kerusakan hutan telah menimbulkan kerusakan lapisan ozone yang berkontribusi besar dalam kerusakan dan pengrusakan alam. Hal ini mengakibatkan gagal panen, bencana kekeringan, krisis lingkungan sampai krisis ekonomi, krisis

¹² Haedar Nashir dkk, *Op.cit.*, hal vi

¹³ *Ibid.*, hal vi

¹⁴ Diolah dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47 Makassar*, Yogyakarta, 2015, hal 126-130

kemanusiaan sampai krisis politik dan berbagai bencana alam abadi lainnya.

Untuk itu diperlukan aksi nyata secara bersama-sama dan berkelanjutan untuk mengurangi dampak dari pemanasan global ini. Dengan mengubah gaya hidup yang boros energi, membersihkan polusi, meminimalkan penggunaan kertas dan sebagainya.

2. Perlindungan kelompok Minoritas

Berbagai peristiwa diskriminasi terhadap minoritas terjadi di berbagai belahan dunia. Kelompok minoritas etnis, agama, ras dan budaya seringkali mendapatkan tekanan, intimidasi, diskriminasi bahkan sampai kekerasan oleh kelompok mayoritas. Hal ini terjadi pada mereka yang beragama muslim terutama yang berdomisili di negara-negara Eropa. Namun minoritas tidak hanya dalam bidang agama, tetapi juga kelompok termarginalkan atau sub-ordinasi secara sosial seperti buruh, kelompok *difable* dan sebagainya.

Jika diskriminasi oleh mayoritas kepada minoritas ini tidak dihentikan, maka dunia akan terus dipenuhi kekerasan. Ketika minoritas menjadi mayoritas, maka mereka akan bergantian menindas yang kecil. Maka mata rantai diskriminasi ini harus diputus.

3. Eksistensi Manusia di Bumi

Dunia saat ini mengalami persoalan yang berkaitan dengan eksistensi manusia dalam kehidupannya. Hal ini terkait ledakan penduduk, keterbatasan sumber daya alam, serta ancaman musnahnya manusia akibat senjata nuklir. Holocaust dan perang dunia kedua cukup menjadi

pelajaran bagi umat manusia bahwa perkembangan teknologi juga menimbulkan kekhawatiran bagi manusia itu sendiri.

Oleh karena itu, diperlukan etika kemanusiaan global berbasis agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang utama seperti orientasi hidup saling kasih sayang, damai, toleran, tengahan serta keshalehan dan akhlak mulia.

4. Pemanfaatan Teknologi Komunikasi

Dunia sudah memasuki era digital sebagai akibat dari kemajuan teknologi komunikasi yang sangat pesat. Manusia secara fisik terpisahkan oleh batasan geografis senantiasa terkoneksi satu dengan yang lainnya dengan mudah.

Teknologi informasi sebagaimana teknologi lainnya memiliki manfaat dan *madlarat* bagi pemakainya. Umat Islam diharapkan tidak hanya menjadi pengguna yang pasif, tetapi juga harus menguasainya dengan baik agar bermanfaat sebagai sarana dakwah.

5. Mengatasi Masalah Pengungsi

Peperangan yang terjadi di beberapa kawasan telah menimbulkan penderitaan dan kematian bagi rakyat yang tidak berdosa. Ribuan manusia meninggal dunia dan ratusan ribu lainnya terlunta-lunta sebagai pengungsi, terusir dari kampung halamannya sendiri. Banyak diantara mereka adalah umat Islam yang berasal dari Irak, Syria, Yaman, Myanmar, Somalia, Eritria dan sebagainya. Persoalan pengungsi ini makin kompleks ditengah krisis ekonomi. Banyak negara yang menolak dan mengusir para pengungsi dari tanah air mereka.

Salah satunya lagi yang menjadi alasan Muhammadiyah memutuskan untuk mulai mengkampanyekan visi kosmopolitanisme Islam Berkemajuan adalah karena melihat beberapa kegagalan kelompok Islam di dunia. Muhammadiyah mungkin melihat ada ketidakmampuan banyak kelompok Islam untuk berfikir luas, keluar dari bingkai kelompok agama.

Kasus yang terjadi di Mesir dan Tunisia menunjukkan bahwa ketika umat Islam mendapat kekuasaan atau kesempatan memimpin, maka yang pertama kali diurus atau yang paling sering di perhatikan adalah urusan kelompok agama saja. Pasca Arab Spring, Ikhwanul Muslimin memenangkan pemilu di Mesir dengan mendapat suara terbanyak dan kemudian Mohamed Mursi terpilih menjadi presiden. Namun, baru satu tahun memimpin, kekecewaan demi kekecewaan datang langsung dari rakyat Mesir itu sendiri. Rasa kecewa itu yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak militer untuk melakukan kudeta dengan menggunakan kekuatan rakyat.¹⁵

Demikian pula yang terjadi di Tunisia dengan Partai Ennahda. Partai ini jauh lebih terbuka terhadap perbedaan dan pluralitas di masyarakat dengan berusaha merangkul beragam kelompok dan menjembatani berbagai perbedaan. Bahkan banyak yang melihat partai ini jauh lebih baik dari AKP (Adelet ve Kalkınma Partisi) di Turki. Namun, pemerintahan transisi yang dipimpin oleh Moncef Marzuki dari Ennahda Party, akhirnya kalah dalam pemilu yang diadakan tiga tahun setelah Arab Spring. Mereka dianggap tak bisa memuaskan harapan berbagai kelompok kepentingan di masyarakat.¹⁶

¹⁵ Ahmad, *Op.cit.*, hal 62

¹⁶ *Ibid.*, hal 62-63

Pada tahun 1980-an dan 1990-an, gerakan-gerakan Islam yang mendominasi suatu negara atau wilayah, tidak jarang memonopoli gerakan-gerakan oposisi di negara-negara Islam dalam menentang rezim yang berkuasa. Keberhasilan gerakan Islam dalam mendominasi gerakan-gerakan oposisi dan menjadi satu-satunya “kekuatan alternatif” dari rezim yang berkuasa terkait erat dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh rezim tersebut. Kegagalan demokrasi liberal pada wilayah-wilayah muslim merupakan fenomena yang lahir sejak akhir 1880-an, selalu terulang selama satu abad penuh. Kegagalan ini disebabkan oleh adanya hubungan yang tidak sehat antara kultur masyarakat Islam dengan pandangan Barat yang liberal.¹⁷

Pada pertengahan 1990-an, hanya terdapat dua pemerintah Islam yang benar-benar berkuasa, di Iran dan Sudan. Beberapa negara Islam seperti Turki dan Pakistan, menyatakan diri sebagai negara yang demokratis. Negara di luar kedua negara tersebut tidak ada yang menganut sistem demokrasi, namun berbentuk monarki, sistem satu partai, rezim militer, diktator (otoriter), atau kombinasi dari masing-masing sistem ini, yang pada umumnya terbatas pada sistem kekeluargaan, klan, kesukuan dan dalam beberapa kasus, sangat tergantung pada dukungan dari luar (asing). Baik Arab maupun Marokko berusaha menerapkan sistem pemerintahan Islam. Sebagian pemerintahan Islam, untuk menjustifikasi kekuasaan mereka, kurang memiliki landasan nilai-nilai Islami, demokratis dan nasionalis. Mereka menggunakan istilah Clement Henry Moore, yaitu “*Bunker Regimes*” yang cenderung represif, korup dan tidak memperhatikan kepentingan-kepentingan dan aspirasi masyarakatnya. Sekalipun

¹⁷ Samuel P. Huntington, *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia* (terj.), Jakarta, Qalam, 2012, hal. 189-190

demikian, rezim-rezim tersebut dapat langgeng dan bertahan lama, jarang mengalami kegagalan.¹⁸

Cara berfikir sektarian inilah, yang hanya untuk partai dan kelompok agamanya, ini diantaranya yang membuat Islam dapat kalah atau orang tak percaya dengan banyak kelompok Islam lagi. Umat Islam ini masih sulit berfikir atau berjuang dengan melepaskan belenggu kelompok. Meminjam bahasa Buya Syafi'i, mestinya kita sudah membalikkan cara berpikir kita dari "kemanusiaan, ke-Indonesiaan, dan kemanusiaan" menuju "kemanusiaan, kebangsaan dan ke-Muhammadiyah". Namun, yang terjadi tetap pada pola yang pertama. Ringkasnya ada dua persoalan yang sering membuat umat Islam mengalami kegagalan –walaupun Ahmad dalam hal ini mengatakan "umat Islam kalah", namun penulis lebih memilih diksi "kegagalan" agar tidak terkesan emosional-, pertama adalah karena "*Minority Complex*" dan yang kedua adalah cara berfikir gerakan atau kelompok Islam yang sektarian.¹⁹

Dari pembelajaran kelompok-kelompok Islam inilah, yang bukan tidak mungkin menjadikan visi kosmopolitanisme Islam Berkemajuan ini sebagai upaya atau solusi "alternatif" Muhammadiyah atas kegagalan banyak kelompok Islam dalam berinteraksi dengan peradaban diluar Islam itu sendiri.

Dari semua persoalan dunia Islam secara global sampai julukan identitas-identitas diatas yang dilekatkan kepada Muhammadiyah pada zaman yang berbeda inilah, tentu merepresentasikan kondisi sosial atau struktural dalam tubuh Muhammadiyah itu sendiri. Namun apakah benar "Islam Berkemajuan" menjadi identitas baru bagi Muhammadiyah? Apakah sudah sesuai kondisi sosial

¹⁸*Ibid.*, hal 188

¹⁹ Ahmad, *Op.cit.*, hal 63

dan struktural Muhammadiyah sebagai Islam yang Berkemajuan? Siapa yang pertama kali memunculkan wacana Islam Berkemajuan itu? Dan apa referensinya? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat penelitian ini menjadi menarik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, untuk memfokuskan analisis pada penelitian ini, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

“Bagaimana Muhammadiyah mengkonstruksi identitas Islam Berkemajuan pasca Muktamar ke-47 di Makassar pada dokumen-dokumen resminya.”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya Muhammadiyah untuk mengkonstruksi Islam yang Berkemajuan itu sendiri.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Memperkaya kajian ilmu komunikasi Indonesia yang kualitatif terutama dengan pendekatan analisis wacana kritis.
 - b. Memberikan deskripsi bagaimana sejarah wacana Islam Berkemajuan menurut Muhammadiyah itu sendiri.
 - c. Memberikan deskripsi bagaimana Muhammadiyah mengkonstruksi identitas Islam Berkemajuan pasca Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan pengertian kepada masyarakat luas tentang bagaimana sebenarnya Islam Berkemajuan itu sendiri.
- b. Memberikan masukan kepada Muhammadiyah tentang konstruksi Identitas Islam Berkemajuannya.

E. Kajian Teori

E. 1. Wacana dan Ideologi

Untuk mengetahui apa itu wacana, kita dapat melihat pandangan Foucault dan Louis Althusser. Inti dari pemikiran Foucault tentang wacana itu sendiri adalah, bahwa wacana merupakan praktik sosial. Wacana berperan dalam mengontrol, menormalkan dan mendisiplinkan individu. Menurutnya, wacana kadang kala sebagai bidang dari semua pernyataan (*statement*), kadang kala sebagai sebuah individualisasi kelompok pernyataan dan kadang kala sebagai praktik regulatif yang pernah dilihat dari sejumlah pernyataan.

Adapun Althusser menjelaskan tentang peran wacana dalam mendefinisikan individu dan memposisikan seseorang dalam posisi tertentu. Wacana-wacana tertentu kadang memang sengaja dibuat untuk membentuk subjek dalam posisi-posisi tertentu dalam rangkaian dengan kekuatan sosial masyarakat. Itulah kenapa dalam konsepsi Foucault maupun Althusser wacana tidak dapat dilepaskan dari kuasa (*power*).²⁰

²⁰Eriyanto, *Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media*, Yogyakarta, LKis, 2001, hal 19.

Foucault menjelaskan bahwa praktik kuasa dapat berlangsung dimana saja dengan aturan, sistem-sistem dan dimana saja masih ada relasi antar manusia, di situ sebenarnya kuasa sedang bekerja. Foucault juga menegaskan bahwa pengetahuan adalah kuasa, karena kekuasaan selalu teraktualisasi lewat pengetahuan dan pengetahuan selalu punya efek kuasa. Penyelenggaraan kekuasaan, menurut Foucault, selalu memproduksi pengetahuan sebagai basis dari kekuasaannya. Bagi Foucault, kekuasaan selalu disusun, dimapankan, dan diwujudkan lewat pengetahuan dan wacana tertentu, menurutnya, publik tidak dikontrol lewat kekuasaan yang bersifat represif tetapi diatur dan disiplinkan lewat wacana. Dimana memproduksi bentuk-bentuk kategorisasi perilaku sebagai baik atau buruk, sebagai bentuk pengendalian perilaku.²¹

Adapun Roger Fowler (1997) wacana adalah komunikasi lisan atau tulisan yang dilihat dari titik pandang kepercayaan, nilai dan kategori yang masuk di dalamnya. Kepercayaan di sini mewakili pandangan dunia, sebuah organisasi atau representasi dari pengalaman.²²

Ada yang mengartikan wacana sebagai unit bahasa yang lebih besar dari kalimat, ada juga yang mengartikan sebagai pembicaraan atau dikursus. Kata wacana juga dipakai oleh banyak kalangan mulai dari studi bahasa, psikologi sosiologi, politik, komunikasi, sastra, dan sebagainya. Pemakaian istilah ini sering kali diikuti dengan beragamnya istilah, definisi, bukan hanya tiap disiplin ilmu mempunyai istilah sendiri, banyak ahli memberikan definisi dan batasan yang berbeda mengenai wacana tersebut. Bahkan kamus, kalau dianggap

²¹*Ibid*, hal. 66-67.

²²*Ibid*, hal. 2.

menunjuk pada referensi pada acuan yang objektif, juga mempunyai definisi yang berbeda-beda pula. Luasnya makna ini dikarenakan oleh perbedaan lingkup dan disiplin ilmu yang memakai istilah wacana.

Kebanyakan kasus yang mendasari “wacana” adalah gagasan umum, bahwa bahasa ditata menurut pola-pola yang berbeda yang diikuti ujaran para pengguna bahasa ketika ambil bagian dalam dimensi sosial yang berbeda.²³

Aart Van Zoest menegaskan bahwa sebuah teks tak pernah lepas dari ideologi dan memiliki kemampuan untuk memanipulasi pembaca ke arah satu ideologi (Sobur, 2006:60). Hal ini karena suatu teks sebagai sebuah wacana, baik yang tertulis maupun yang diucapkan secara lisan memiliki peran dalam proses produksi ideologi.

Secara etimologis, Ideologi berasal dari bahasa Yunani: *idea* dan *logia*. *Idea* berasal dari kata *idein* yang berarti melihat. Sedang *idea* dalam *Webster's New Colligate Dictionary* diartikan sebagai sesuatu yang ada dalam pikiran sebagai hasil perumusan suatu pemikiran atau rencana. Adapun *logia* berasal dari kata *logos* yang berarti *word*. Kata ini berasal dari kata *legein* yang berarti *to speak* (berbicara). Selanjutnya kata *logia* dapat diartikan *science* (pengetahuan) atau teori. Jadi dengan begitu dapat kita simpulkan secara arti kata, ideologi adalah pengucapan dari yang terlihat atau pengutaraan apa yang terumus di dalam pikiran sebagai hasil dari pemikiran.²⁴

²³*Ibid*, hal. 13.

²⁴Sukarna (1981) dalam Alex Sobur, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotika dan Analisis Framing*, Bandung, Rosda Karya, hal.64.

Istilah ideologi merupakan istilah yang banyak digunakan dalam ilmu-ilmu sosial, namun memiliki banyak sekali makna. Sehingga Thompson berpendapat bahwa konsep ideologi bermakna ambigu dan paling tidak jelas maknanya. Setiap tokoh ilmuwan sosial hampir berbeda dalam mendefinisikan ideologi itu sendiri.

Tentang ambigunya makna ideologi ini, Nuswantoro dalam bukunya yang mengutip pendapat Jorge Larrain (1966) mengatakan bahwa:

*“Ideologi adalah satu dari sekian banyak konsep yang paling ekuivokal (meragukan) dan elusif (sukar ditangkap) yang terdapat dalam ilmu-ilmu sosial; tidak hanya karena beragamnya pendekatan teoritis yang menunjukkan arti dan fungsi yang berbeda-beda, tetapi karena ideologi adalah konsep yang sarat dengan konotasi politik dan digunakan secara halus dalam kehidupan sehari-hari dengan makna beragam.”*²⁵

Menurut Thompson, sejak pertama kali istilah ideologi dikenalkan oleh Destutt de Tracy (1796) untuk menyebut nama ilmu tentang ide, kemudian istilah ideologi begitu cepat menjadi senjata dalam sebuah peperangan politik yang habis-habisan di bidang bahasa.²⁶

Untuk menjembatani ambiguitas makna ideologi tersebut, Thompson kemudian membagi ideologi menjadi dua konsepsi. Konsepsi yang pertama ialah konsepsi netral. Ideologi disini dipahami sebagai sistem pemikiran, sistem kepercayaan dan sistem simbolik yang bersinggungan dengan kegiatan sosial atau praktik politik. Konsepsi yang kedua adalah konsepsi kritis terhadap ideologi. Berbeda dengan konsep yang pertama, konsepsi kritis menempatkan

²⁵Nuswantoro, *Daniel Bell: Matinya Ideologi*, Magelang, Indonesiatara, 2001, hal. 2.

²⁶ John B. Thompson, *Kritik Ideologi Global: Teori Sosial Kritis Tentang Relasi Ideologi dan Komunikasi Massa*, Yogyakarta, IRCiSod, 2004, hal. 49.

ideologi sebagai konsep yang tidak netral. Ideologi di produksi dan dipergunakan secara konstan untuk melayani kelompok dominan dalam masyarakat.²⁷

Berbeda dengan Thompson, Raymond William mengklasifikasikan penggunaan ideologi dalam tiga ranah. Pertama ideologi merupakan sebuah sistem kepercayaan yang dimiliki oleh kelompok atau kelas tertentu. Di sini ideologi tidak dipahami sebagai sesuatu yang ada dalam diri individu sendiri, melainkan diterima dari masyarakat, ideologi ditentukan oleh masyarakat dimana dia hidup. Kedua, ideologi adalah sebuah sistem kepercayaan yang dibuat –Marx menyebutnya ide atau kesadaran palsu- yang bisa dilawankan dengan pengetahuan ilmiah. Ketiga, proses umum produksi makna dan ide. Ideologi disini adalah istilah digunakan untuk menggambarkan produksi makna.²⁸

Thompson menjelaskan bahwa mempelajari ideologi berarti mempelajari cara-cara bagaimana makna diarahkan untuk membangun dan mempertahankan relasi dominasi.²⁹ Karena itu, mengkaji ideologi berarti mengkaji bagaimana suatu makna di konstruksi melalui simbol-simbol tertentu dan bagaimana makna itu dikaitkan dengan konteks yang melingkupinya. Thompson menjelaskannya dengan kalimat seperti ini:

²⁷*Ibid*, hal. 86.

²⁸John Fiske (1990) dalam Eriyanto, *op. cit.*, hal. 87.

²⁹John B. Thompson, *op. cit.*, hal. 90.

“kajian tentang ideologi mengharuskan kita untuk mengorek dan menginvestigasi cara-cara bagaimana suatu makna di konstruksi dan disampaikan melalui simbol-simbol tertentu dengan sangat bervariasi, mulai dari ungkapan bahasa sehari-hari sampai citra dan teks yang kompleks. Saat mengkaji ideologi kita mesti mempertanyakan ‘apakah’, demikian juga ‘bagaimana’ suatu makna yang dimobilisir dalam bentuk-bentuk simbol digunakan dalam konteks tertentu untuk membangun dan mempertahankan relasi dominasi.”³⁰

Jadi dapat disimpulkan bahwa, konstruksi wacana dalam konteks tertentu yang dibangun oleh suatu kelompok merupakan ekspresi ideologi dari kelompok tersebut. Dalam bahasa lain, kelompok tertentu sengaja mengkonstruksi wacana tertentu dalam rangka menyebarkan ideologinya agar dapat diterima oleh publik sehingga dapat melanggengkan dominasinya.

E. 2. Analisis Wacana Kritis

Analisis wacana dalam paradigma kritis menekankan pada konstelasi kekuasaan yang terjadi pada proses produksi dan reproduksi makna. Dalam analisis wacana kritis, individu dan bahasa tidak dianggap sebagai subjek yang netral karena penafsiran individu terhadap realitas sosial dipengaruhi oleh kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat. Demikian juga bahasa yang memiliki peran merepresentasikan sesuatu dalam membentuk subjek tertentu, tema-tema wacana tertentu, maupun strategi-strategi di dalamnya.³¹

Berikut ini disajikan karakteristik penting dari analisis wacana kritis. Bahan diambil dari tulisan Teun A. Van Dijk, Fairclough dan Wodak.³²

1. Tindakan

³⁰*Ibid*, hal. 19.

³¹Eriyanto, *op. cit.*, hal. 6.

³² Diolah dari Eriyanto, *Ibid.*, hal 8-14

Prinsip pertama, wacana dipahami sebagai sebuah tindakan (*action*). Dengan pemahaman semacam ini mengasosiasikan wacana sebagai bentuk interaksi. Ada dua konsekuensi bagaimana wacana harus di pandang. Pertama, wacana dipandang sebagai sesuatu yang bertujuan, apakah untuk mempengaruhi, mendebat, membujuk, menyangga, bereaksi dan sebagainya. Seseorang berbicara atau menulis mempunyai maksud tertentu, baik besar maupun kecil. Kedua, wacana dipahami sebagai sesuatu yang diekspresikan secara sadar, terkontrol, bukan sesuatu yang diluar kendali atau diekspresikan diluar kesadaran.

2. Konteks

Analisis wacana kritis mempertimbangkan konteks dari wacana, seperti latar, situasi, peristiwa dan kondisi. Wacana disini dipandang, diproduksi, dimengerti dan dianalisis pada suatu konteks tertentu. Ada beberapa konteks yang penting karena berpengaruh terhadap produksi wacana. Pertama, partisipan wacana. Jenis kelamin, umur, pendidikan, kelas sosial, etnis, agama, dalam banyak hal relevan menggambarkan wacana. Kedua, setting sosial tertentu, seperti tempat, waktu, posisi pembicara dan pendengar atau lingkungan fisik adalah konteks yang berguna untuk mengerti suatu wacana. Oleh karena itu, wacana harus dipahami dan ditafsirkan dari kondisi dan lingkungan sosial yang mendasarinya.³³

³³ Menurut Van Dijk, wacana bahkan dapat dipahami dalam level definisi yang lebih tinggi dan abstrak. Disini tergantung pada batas definisi dan perspektif teoritis yang dipakai. Seperti wacana

3. Historis

Salah satu aspek penting untuk bisa mengerti teks adalah dengan menempatkan wacana teks itu dalam konteks historis tertentu. Pemahaman mengenai wacana teks ini hanya akan diperoleh kalau kita bisa memberikan konteks historis dimana teks itu diciptakan. Oleh karena itu, pada waktu melakukan analisis perlu tinjauan untuk mengerti mengapa wacana yang berkembang atau dikembangkan seperti itu, mengapa bahasa yang dipakai seperti itu dan seterusnya.

4. Kekuasaan

Analisis wacana kritis juga mempertimbangkan elemen kekuasaan dalam analisisnya. Disini, setiap wacana yang muncul, dalam bentuk teks, percakapan atau apapun, tidak dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, wajar dan netral tetapi merupakan bentuk pertarungan kekuasaan. Konsep kekuasaan adalah salah satu kunci hubungan antara wacana dengan masyarakat.

Pemakai bahasa bukan hanya pembicara, penulis, pendengar atau pembaca, ia juga bagian dari anggota kategori sosial tertentu, bagian dari kelompok profesional, agama, komunitas atau masyarakat tertentu. Hal ini mengimplikasikan analisis wacana kritis tidak membatasi diri pada detil teks atau struktur wacana saja, tetapi juga menghubungkan dengan kekuatan dan kondisi sosial, politik, ekonomi dan budaya tertentu.

5. Ideologi

pemenang pemilu tidak bisa otomatis sebagai presiden kita tafsirkan dalam konteks sistem politik, sistem pemilihan umum, sistem kekuasaan dan etika politik, dan sebagainya.

Ideologi juga konsep yang sentral dalam analisis wacana yang bersifat kritis. Hal ini karena teks, percakapan dan lainnya adalah bentuk dari praktik ideologi atau pencerminan dari ideologi tertentu. Seperti dikatakan oleh Van Dijk, bahwa ideologi terutama dimaksudkan untuk mengatur masalah tindakan dan praktik individu atau anggota suatu kelompok. Ideologi membuat anggota suatu kelompok akan bertindak dalam situasi yang sama, dapat menghubungkan masalah mereka dan memberikan kontribusi dalam bentuk solidaritas dan kohesi di dalam kelompok.

E. 3. Kosmopolitanisme³⁴

Kosmopolitan atau apa yang disebut sebagai *cosmopolitanism* merupakan ajaran yang memahami bahwa manusia pada dasarnya merupakan satu komunitas, tanpa sekat-sekat kebangsaan, hal itu dimungkinkan ketika hubungan antar manusia dibangun berdasarkan moralitas. Istilah ini bertolak belakang dengan komunitarianisme atau lebih khusus dengan ideologi-ideologi patriotisme kebangsaan dan juga nasionalisme. Yang baru kita kenal juga istilah ultranasionalisme.

Awal mula ungkapan atau istilah kosmopolitanisme dapat dilacak jauh ke belakang pada masa Yunani Kuno oleh Diogenes of Sinope (L. 412 SM). Suatu ketika Diogenes pernah ditanya dari mana ia berasal, ia kemudian menjawab: “saya seorang warga dunia (*citizen of the world*)”. Ungkapan ini kemudian

³⁴Diolah dari M. Habibullah, *Universalisme dan Kosmopolitanisme Dalam Budaya Islam (Sebuah Analisis Normatif dan Historis)*, pada <http://www.e-journal.iainjambi.ac.id> (TAJIDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin), Volume 11, No. 1, 2012, hal 115-119

dalam bahasa Yunani disebut *kosmopolities*.³⁵ Menurut Nussbaum, ide kosmopolitanisme yang diungkapkan oleh Diogenes merupakan konsep pendobrak batas-batas identitas individual, kelompok dan sosial kemasyarakatan bangsa Yunani ketika itu, dan identitas bangsa-bangsa yang terpengaruh kebudayaan Yunani (*hellenis/hellenes*). Konsep inilah yang kemudian dikembangkan oleh para filosof Stoa (*stoicism*) dalam sebuah konsep yang menekankan bahwa tiap manusia (*human being*) hidup dalam dua komunitas, yaitu komunitas lokal tempat seorang lahir dan juga komunitas dimana argumentasi dan aspirasi manusia secara keseluruhan diakui, yaitu sebagai komunitas dunia global.³⁶

Karena itu, bagi Nussbaum, salah satu cara untuk memahami kosmopolitanisme adalah dengan melacak pemikiran para filosof Stoa tentang model identitas Negara. Dimana seseorang harus menyadari bahwa manusia tidak lepas dari beberapa lingkaran (lingkungan) yang berawal dari lingkaran pribadi manusia itu sendiri, kemudian lingkaran keluarga, lingkaran kerabat, lingkaran kekerabatan, lingkaran kesukuan, lingkaran kebangsaan, hingga lingkaran kemanusiaan. Artinya para filosof Stoa memahami bahwa manusia pada dasarnya adalah warga dunia, dimana tugas warga dunia adalah untuk mewarnai setiap lingkaran menuju terminal yang menjadikan semua manusia lebih sebagai penduduk negerinya sendiri (teman/kerabat), demikian seterusnya, yaitu

³⁵Ungkapan tersebut dapat dirujuk dalam Amanda Anderson, *Cosmopolitanism, Universalism, and the Divided Legacies of Modernity*, dalam P. Cheah dan B. Robbins (ed.), *Cosmopolitics: Thinking and Feeling Beyond the Nation*, Minneapolis and London, University of Minnesota Press, 1998

³⁶Martha C. Nussbaum, *Kant and Stoic Cosmopolitanism*, pada *The Journal of Political Philosophy*, Volume 5, No. 1, 1997, hal. 1-25

bagaimana seseorang dapat memperlakukan orang lain ibarat kerabatnya sendiri tanpa melihat latar belakang budaya, etnis dan identitas yang melekat dalam kemanusiaan lainnya.³⁷

Kondisi inilah yang menginspirasi pemikiran moral beberapa filosof Barat kontemporer, seperti Jacques Derrida dalam konsep keramah-tamahan (*hospitality*), yang menyediakan kerangka teoritik hubungan antar manusia dalam hidup keseharian sebagai bagian dari kode-kode hukum kehidupan manusia. Bagi Derrida, pondasi keramah-tamahan etik adalah kesediaan dan penerimaan terhadap orang lain (*the other*) dalam sebuah “rumah”. Etika demikian merupakan konsep keramah-tamahan yang murni tanpa dikondisikan sebagai hasrat yang dinilai dari hubungan antar sesama. Dengan demikian, isolasi sosial tidak dibenarkan dalam kehidupan di dunia karena yang terbaik bagi manusia adalah bagaimana membangun interaksi yang baik antar sesama.³⁸

Adapun yang menjadi dasar filosofis kosmopolitanisme adalah moral universalis, yang mengajarkan bahwa semua manusia apapun kebangsaannya, harus tunduk pada standar-standar moral yang sama. Batasan-batasan yang membedakan antar bangsa, negara, budaya atau sosial-kemasyarakatan secara moral tidaklah relevan.³⁹

Dengan demikian kosmopolitanisme merupakan oposisi langsung dari tradisi politik negara-bangsa, yang menegaskan batas-batas negara-bangsa secara nyata dalam teritorial tertentu. Kosmopolitanisme menginginkan adanya

³⁷*Ibid.*, hal. 25

³⁸*Ibid.*, hal. 9

³⁹ Tentang hal ini lebih jauh rujuk dalam Kwame Appiah, *Cosmopolitanism Ethics in a World of Strangers*, London, Penguin Books, 2006

upaya untuk melampaui batas-batas negara-bangsa menuju terbentuknya suatu sistem nilai yang berlaku bagi tiap manusia.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis*) yang diimplementasikan dalam bentuk analisis kualitatif. Dalam analisis wacana kritis kualitatif, kita akan lebih banyak menjawab pertanyaan “bagaimana”; bagaimana isi dari teks dan bagaimana cara pesan dan teks disampaikan melalui media-media resmi Muhammadiyah seperti website Muhammadiyah.or.id dan Tanfidz Keputusan Muktamar sehingga kita dapat melihat makna-makna yang tersembunyi dari suatu teks yang ada di tampilan pada media-media tersebut.

F. 1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan teknik dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data-data berupa teks-teks baik itu buku, artikel atau majalah yang berkaitan dengan masalah penelitian yang sedang diteliti. Penulis juga melakukan studi pustaka dengan mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan wacana Identitas Islam Berkemajuan, hal ini dilakukan untuk mencari tahu konteks-konteks sosial yang mempengaruhi proses produksi dan reproduksi wacana.

F. 2 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis wacana kritis menurut model pendekatan sosio kognitif dari Teun Van

Dijk. Secara lebih rinci, elemen-elemen analisis pendekatan sosio kognitif dari Teun Van Dijk yang akan digunakan pada penelitian ini adalah:⁴⁰

1. Teks

Teks menurut Van Dijk memiliki struktur yang terdiri dari:

- a. Struktur makro, merupakan makna global dari suatu teks yang dapat diamati dari topik atau tema yang diangkat oleh suatu teks. Disini kita mengamati tematik yaitu tema apa yang dikedepankan dalam suatu wacana.
- b. Superstruktur, merupakan kerangka atau susunan teks seperti: judul, lead, skema teks, pendahuluan, isi, penutup dan kesimpulan. Disini kita mengamati skematik yaitu bagaimana bagian dan urutan berita di skemakan dalam teks wacana secara utuh.
- c. Struktur Mikro, merupakan makna lokal dari suatu teks yang dapat dikaji lewat pilihan kata, argumentasi eksplisit maupun implisit, kalimat dan gaya bahasa digunakan dalam suatu teks. Ini meliputi:
 - 1) Semantik, yaitu makna yang ditekankan,
 - 2) Sintaksis, bagaimana kalimat (bentuk dan susunannya) dipilih,
 - 3) Stilistik, bagaimana pilihan kata dipakai dalam teks dan
 - 4) Retoris, bagaimana dan dengan cara apa penekanan dilakukan.

2. Kognisi Sosial

Menganalisis kognisi sosial berarti melihat bagaimana suatu teks diproduksi, ini dapat dicermati dengan melihat kesadaran mental si pembuat teks yang berupa kesepakatan bersama atas pengetahuan

⁴⁰Diolah dari Eriyanto, *Ibid.*, hal. 255-275

tertentu atas suatu peristiwa, sikap, ideologi, norma dan nilai-nilai yang telah menjadi model dalam memandang masalah tertentu.

3. Konteks sosial

Dalam analisa konteks sosial kita mencermati hubungan antara teks dengan konteks yang lebih luas (termasuk didalamnya situasi sosial, aksi-aksi dan aktor-aktor serta struktur-struktur sosial) dan model konteks peristiwa untuk mengetahui versi atas suatu konteks atau peristiwa yang diungkap dalam konteks.

Meskipun terdiri dari banyak elemen menurut Van Dijk semua elemen tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan mendukung satu sama lainnya. Pada saat melakukan analisis, penulis tidak melakukannya satu per satu secara terpisah antara teks, kognisi sosial dan konteks sosial. Seluruh elemen analisis akan dianalisis secara holistik. Analisis teks akan dihubungkan dengan kognisi sosial dan konteks yang melingkupi teks tersebut secara langsung pada satu tema kajian tertentu.